

Butuh Tenaga Ahli Bersertifikasi, Pemerintah Harapkan Banyak Lahir dari ITN Malang

Sebagai pasar infrastruktur di Asia, Indonesia menduduki posisi ke empat setelah Cina, India, dan Jepang. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur yang lebih dari 2.500 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Kontruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Cakra Nagara, S.T.,M.T.,M.E., saat memberikan sambutan dalam “Distance Learning” (SIBIMA Konstruksi) dan Seminar Penerapan Teknologi Konstruksi Metode Erection Jembatan Bentang Panjang, Kamis (1/2), di Kampus I ITN Malang.

“Ini (dana) dua setengah kali lipat kalau dilihat dari periode sebelumnya. Diperkuat juga dengan data RPJMN 2015-2019 bahwa di berbagai daerah saat ini masih dalam proses pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.



Butuh Tenaga Ahli Bersertifikasi, Pemerintah Harapkan Banyak Lahir dari ITN Malang

Menurut Cakra (sapaan Cakra Nagara), Direktorat Jenderal Bina Kontruksi menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga ahli Indonesia mencapai 800 ribu. Sedangkan data di BPS dari 7,7 juta tenaga kontruksi yang perlu disertifikasi sebesar 3.1 juta. "Saat ini data yang ada di lapangan hanya sekitar 500 ribu," paparnya.

Aturan undang-undang masih menurut Cakra, seorang sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan ada lima sampai enam undang-undang yang mendasari/menyarankan perlunya sertifikasi. Yaitu, UU pemerintah daerah tentang keahlian, UU tentang ketenagakerjaan, UU tentang pendidikan tinggi, UU keinsinyuran, UU kontruksi yang baru, serta UU tentang arsitek.

Melihat kondisi tersebut maka Kementerian PUPR memandang

betapa strategis dan pentingnya pembinaan calon-calon tenaga ahli. “Makanya kami melakukan pendekatan secara aktif ke kantong-kantong tenaga ahli bidang kontruksi seperti ke perguruan tinggi dan asosiasi profesi, pemerintah daerah provinsi dan LPJK provinsi seluruh Indonesia untuk mendapatkan tenaga ahli yang kompeten,” harapnya tenaga ahli kompeten juga banyak lahir dari ITN Malang.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada mahasiswa dengan pelatihan SIBIMA Kontruksi. “Distance learning” ini merupakan pelatihan jarak jauh sehingga calon tenaga ahli nantinya memiliki persyaratan kompetensi sesuai syarat yang dibutuhkan oleh industri.

Ia mengatakan Skill, Knowledge, dan Attitude merupakan kompetensi yang harus diperhatikan. Keterampilan, pengetahuan dan sikap inilah yang disasar oleh pemerintah dalam meningkatkan SDM. Kompetensi tersebut akan memperkuat calon lulusan untuk siap masuk ke dunia industri.

“Perguruan tinggi harus menyiapkan para lulusannya untuk siap terjun dalam bidang industri salah satunya memahami pengetahuan spesifikasi teknis. Karena itu merupakan kunci pekerjaan kontruksi,” pesannya. (mer/humas)